

PENGARUH ASPEK-ASPEK MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH TERHADAP TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (Studi Kasus Pada SKPD Kota Yogyakarta)

Dominikus Ledo

*Alumni Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa
Email: chobarmitoz@gmail.com*

Sri Ayem

*Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa
Email: sriayemfeust@gmail.com*

Abstract

This research aimed to test the effect of regional financial statement presentation, accessibility regional financial statement, internal control, implementation of performance-based budgeting, and implementation of accrual-based government accounting standard on the transparency of regional financial management. Data in this research obtained by method of survey with questionnaires. The population in this research is all employees in the SKPD city of Yogyakarta. The technique of sampling using nonprobability sampling method of purposive sampling. The sample in this research is the structural officers, employees/staff that carry out the functions of accounting/administration financial experience working for one year in each SKPD in the city of Yogyakarta. The questionnaire can be processed a total of 77 questionnaires. Data analysis techniques in this study using the technique of multiple linear regression. The results of regression test showed that the regional financial statement presentation no significant effect on the transparency of regional financial management. The accessibility of the regional financial statements significant effect on the transparency of regional financial management. Internal control no significant effect on the transparency of regional financial management. The implementation of performance-based budgeting no significant effect on the transparency of regional financial management. The implementation of accrual-based government accounting standards significant effect on the transparency of regional financial management.

Keyword: *presentation of regional financial statement, accessibility, internal control, performance-based budgeting, the governmental accounting standards accrual-based, transparency of regional financial management.*

PENDAHULUAN

Tuntutan transparansi dalam sistem Pemerintah semakin meningkat pada era reformasi saat ini, tidak terkecuali transparansi dalam pengelolaan keuangan

pemerintah daerah. Hal ini terutama disebabkan oleh ditetapkannya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua Undang-Undang ini memberikan peluang yang lebih besar kepada daerah untuk lebih mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah, baik menyangkut sumber daya manusia, dana, maupun sumber daya lain yang merupakan kekayaan daerah. Sebagai konsekuensinya pemerintah daerah harus dapat meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Salah satu prasyarat untuk mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan daerah adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan. Pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik dalam rangka melaksanakan amanat rakyat. Akan tetapi, upaya perbaikan penyajian pelaporan keuangan daerah nampaknya belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah maupun di jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah daerah (Aliyah dan Nahar, 2012).

Informasi laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas jika pemerintah daerah terus meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memfasilitasi berbagai pihak yang berkepentingan agar dapat mengetahui atau memperoleh laporan keuangan dengan mudah. Publikasi laporan keuangan oleh pemerintah daerah melalui surat kabar, internet, atau cara lain nampaknya belum menjadi hal yang umum bagi sebagian daerah. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif sekurang-kurangnya harus memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, dan memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, terutama terhadap perwujudan transparansi pengelolaan keuangan daerah (Sari, 2012).

Pemerintah daerah perlu melakukan pengelolaan dana publik yang didasarkan pada konsep dasar *performance budgeting system* (anggaran kinerja). Selama ini terjadi di setiap daerah, dalam proses penyusunan, pembahasan sampai pada penetapan anggaran yang termuat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang disusun berdasarkan kumpulan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, umumnya perhatian DPRD lebih terfokus pada besarnya anggaran.

Pada tahun 2010, pemerintah mengeluarkan peraturan baru tentang standar akuntansi pemerintahan, melalui PP Nomor 71 Tahun 2010, yang mengatur tentang penggunaan basis akrual dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintah. Standar akuntansi

pemerintahan berbasis akrual diharapkan lebih sistematis menuju pengelolaan keuangan yang lebih baik sebagai salah satu agenda reformasi keuangan di Indonesia, serta tantangan di era globalisasi sekarang ini yaitu adanya tuntutan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan dengan adanya akuntansi pemerintahan. Namun adopsi basis akrual ini, sepertinya tidak memperhatikan kondisi kualitas pengelolaan keuangan dan lingkungan pemerintahan di Indonesia sekarang ini, khususnya pemerintah daerah.

Penelitian ini merujuk pada penelitian yang telah dilakukan oleh Hastuti (2015) yang meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah di kabupaten Boyolali, dan juga penelitian yang dilakukan oleh Aliyah dan Nahar (2012) yang meneliti tentang pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kabupaten Jepara, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dalam penelitian ini ditambahkan variabel penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Dalam penelitian ini juga menggunakan populasi, sampel dan waktu penelitian yang berbeda. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "Pengaruh Aspek-aspek Manajemen Keuangan Daerah terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada SKPD Kota Yogyakarta)". Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah, pengendalian internal, penerapan anggaran berbasis kinerja, dan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual berpengaruh secara simultan

terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Mardiasmo (2002;30) transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumberdaya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Menurut Halim dan Darmayanti (2007;33) transparansi merupakan bentuk keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan pengeluaran daerah sehingga publik dapat dengan mudah mendapatkan informasi tentang rencana anggaran pemerintah daerah dalam suatu tahun anggaran tertentu.

Penyajian Laporan Keuangan Daerah

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 1 paragraf 9 sebagaimana terdapat di Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumberdaya.

Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah

Rohman (2009) dalam Aliyah dan Nahar (2012), mengemukakan bahwa aksesibilitas dalam perspektif tata ruang adalah keadaan

atau ketersediaan hubungan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau kemudahan seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, serta kecepatan yang wajar. Menurut Mardiasmo (2002:171), laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Masyarakat sebagai pihak yang memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan publik berhak untuk mendapatkan informasi keuangan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintah.

Pengendalian Internal

Dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Anggaran Berbasis Kinerja

Menurut Mardiasmo (2002:84). Pendekatan anggaran berbasis kinerja disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Menurut

Nordiawan (2006:79) dalam Satyaningsih (2014), tahap-tahap penyusunan anggaran berbasis kinerja adalah sebagai berikut: penetapan, strategi organisasi, pembuatan tujuan, penetapan aktivitas, evaluasi dan pengambilan keputusan. Anggaran berbasis kinerja yang efektif dapat menunjukkan bagaimana keterkaitan antara dana dengan hasil akhir yang dicapai. Apabila terdapat perbedaan antara rencana dengan realisasi maka akan dilakukan review atas sumber input dan menghubungkan keterkaitannya dengan *output* serta *outcome*. *Output* dalam pelaksanaan anggaran berbasis kinerja tercermin dari transparansi pelaporan keuangan.

SAP Berbasis Akrua

PP RI No.71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah standar akuntansi pemerintahan yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. *IFAC Public Sector Committee*, (2002) dalam Wibawa (2016) menyatakan bahwa pelaporan berbasis akrual bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi dan pencapaian tujuan. Melalui pelaporan berbasis akrual, pengguna dapat mengidentifikasi posisi keuangan pemerintah dan perubahannya, bagaimana pemerintah mendanai kegiatannya sesuai dengan kemampuan pendanaannya sehingga dapat diukur kapasitas pemerintah yang sebenarnya.

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan

informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya (Mardiasmo 2002;31). Agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, pemerintah daerah harus meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya, tidak sekedar menyampai-kannya ke DPRD saja, tetapi juga memfasilitasi masyarakat luas agar dapat mengetahui atau memperoleh laporan keuangan dengan mudah (Aliyah dan Nahar, 2012). Sistem pengendalian intern menentukan nilai informasi laporan keuangan yang baik. Sistem pengendalian intern pemerintah merupakan suatu proses yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektifitas, efisiensi, ketaatan terhadap perundang-undangan yang berlaku (Armando, 2013). Anggaran berbasis kinerja yang efektif dapat menunjukkan bagaimana keterkaitan antara dana dengan hasil akhir yang dicapai. Keterkaitan tersebut akan menjadi acuan bagi pengelolaan program yang akan dijalankan (Satyaningsih, 2014). PP RI No.71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah standar akuntansi pemerintahan yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.

H_1 : penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah, pengendalian internal, penerapan anggaran berbasis kinerja, dan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual secara simultan berpengaruh positif terhadap

transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Penyajian laporan keuangan daerah secara lengkap yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan mudah diakses oleh semua pihak yang berkepentingan memungkinkan kontrol dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan bisa berjalan dengan baik (Aliyah dan Nahar, 2012).

H_2 : penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Informasi laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas jika pemerintah daerah terus meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya dapat dilakukan antara lain dengan cara memfasilitasi berbagai pihak yang berkepentingan agar dapat mengetahui atau memperoleh laporan keuangan dengan mudah (Hehanussa, 2012).

H_3 : aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Organisasi memiliki kode etik, staf yang kompeten, dapat dipercaya, dan tanggap dengan perubahan, tugas dan jabatan terstruktur, kebijakan pemisahaan tugas, pemeriksaaan independen, sistem informasi yang baik, pengawasan secara terus menerus dan periodik, pengendalian internal yang tinggi terhadap pegawai maka akan meningkatkan penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah (Hastuti, 2015).

H₄ : pengendalian internal berpengaruh positif terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Hastuti (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa program dan kegiatan yang jelas, pembiayaan masing-masing program, sistem informasi yang mampu menghasilkan informasi yang memadai, peran pihak eksternal, penerapan efisiensi, pemisahan tugas antara lembaga kontrol dan pengguna anggaran, kontrol pada input dan output, bertanggung jawab terhadap output, tepat waktu, dan berkualitas dapat mempengaruhi transparansi pengelolaan keuangan daerah.

H₅ : penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Melalui pelaporan berbasis akrual, pengguna dapat mengidentifikasi posisi keuangan pemerintah dan perubahannya, bagaimana pemerintah mendanai kegiatannya sesuai dengan kemampuan pendanaannya sehingga dapat diukur kapasitas pemerintah yang sebenarnya. Standar akuntansi pemerintahan memiliki kontribusi yang kuat terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, terutama dalam proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang dihasilkan.

H₆ : penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual berpengaruh positif terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah.

KERANGKA PIKIR PENELITIAN

Kerangka pikir penelitian disajikan pada gambar 1.

METODE PENELITIAN

Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan analisa statistik deskriptif dan menggunakan data kuantitatif.

Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi penelitian di SKPD Kota Yogyakarta.

Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah semua pegawai di SKPD yang berada di Pemerintahan Kota Yogyakarta. Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai bagian keuangan di SKPD Kota Yogyakarta. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *nonprobability sampling* metoda *purposive sampling*. Kriteria dari *purposive sampling* ini yaitu sebagai berikut:

- a) Pejabat struktural, para pegawai/staf yang melaksanakan fungsi akuntansi/ tata usaha keuangan yang telah memiliki pengalaman kerja minimal selama 1 tahun.
- b) Pejabat struktural, para pegawai/staf yang melaksanakan fungsi akuntansi/ tata usaha keuangan di masing-masing Dinas pada SKPD kota Yogyakarta

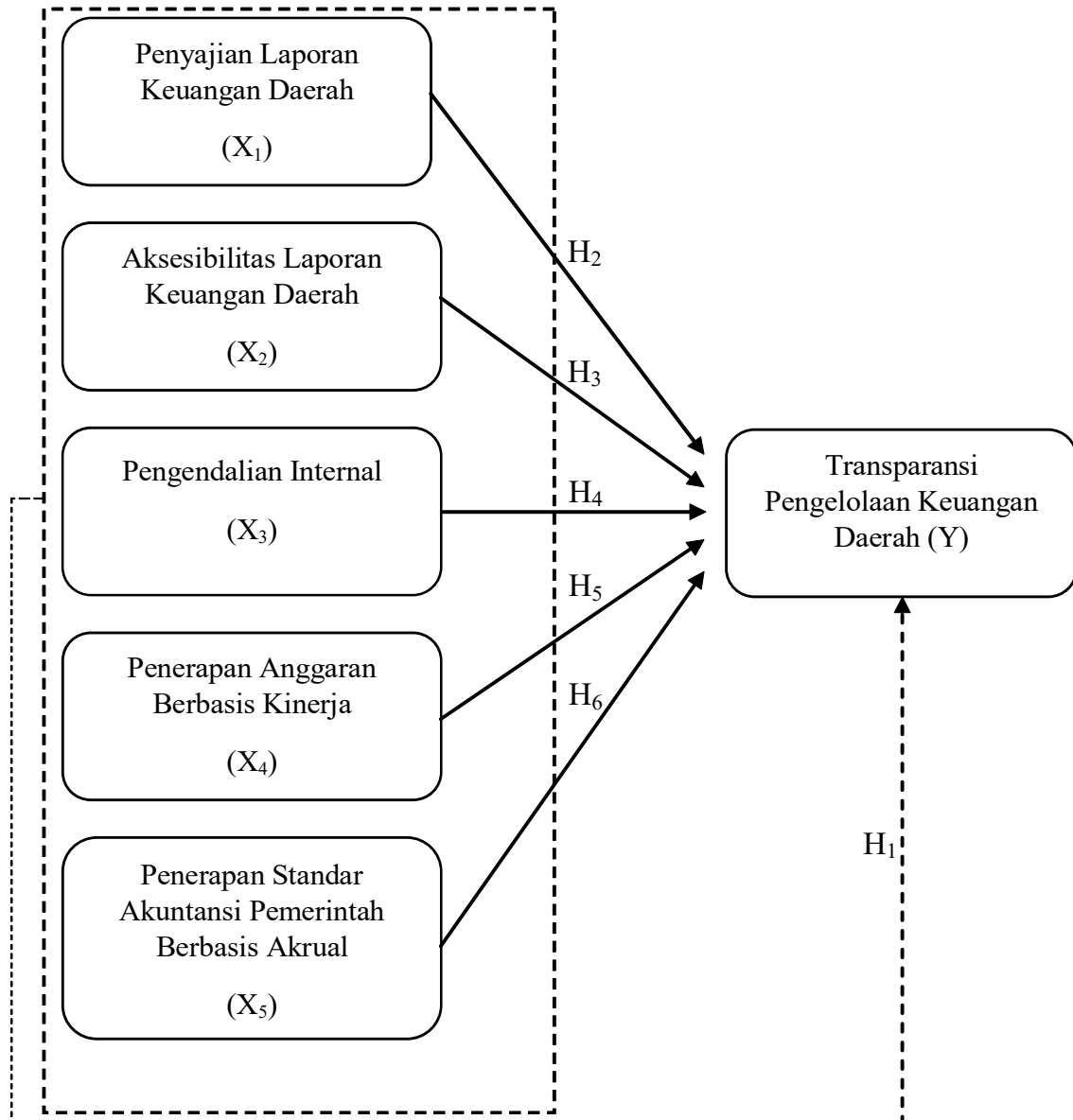
Sumber dan Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan metoda survey dengan penyebaran kuesioner. Kuesioner tersebut didistribusikan oleh peneliti secara langsung kepada responden tanpa melalui perantara.

Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan *software Statistical Package for Social Sciences (SPSS)* versi 17. Data yang diperoleh dari penyebaran

Gambar 1 Kerangka Pemikiran



kuesioner akan diolah melalui beberapa tahap pengujian yang terdiri dari:

1. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner (Ghozali, 2011;52). Pengujian ini menggunakan metode *Korelasi Bivariate Pearson* (Produk Momen Pearson) yaitu untuk membuktikan keberadaan hubungan antara dua variabel.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas ini menggunakan teknik *Cronbach's alpha* (α). Kriteria suatu instrumen penelitian dikatakan reliabel dengan menggunakan teknik ini, bila koefisien reliabilitas (r_i) $> 0,7$ (Ghozali, 2011;48).

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel independen dan

dependen keduanya memiliki distribusi normal atau mendekati normal (Ghozali, 2011;160). Untuk mengetahui normalitas distribusi data dapat dilakukan dengan menggunakan analisis statistik yaitu *Kolmogrov-Smirnov test*. Jika nilai signifikan dari pengujian *One Sample Kolmogorov Smirnov Test* > 0,05 maka data mempunyai distribusi normal (Ghozali, 2011;164).

b. Uji Multikolonieritas

Multikolonieritas menyatakan hubungan antar sesama variabel independen. Deteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi dapat dilihat dari besaran VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *tolerance*. Regresi bebas dari multikolonieritas jika besar nilai $VIF \geq 10$ dan nilai *tolerance* $\leq 0,10$ (Ghozali, 2011;106).

c. Uji Heteroskedasitas

Model regresi yang baik apabila varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap atau homokedasitas (Ghozali, 2011;139). Metode yang digunakan untuk mendeteksi heteroskedasitas adalah dengan uji glejser dengan probabilitas signifikannya diatas tingkat kepercayaan $\alpha = 5\%$ atau 0.05 (Ghozali, 2011;143).

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda (*Multiple Regression*) dilakukan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen (*Explanatory*) terhadap satu variabel dependen. Model regresi berganda dalam pernyataan ini dinyatakan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

Keterangan:

Y : Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

α : konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$: koefisien regresi

X_1 : penyajian laporan keuangan daerah

X_2 : aksesibilitas laporan keuangan daerah

X_3 : pengendalian internal

X_4 : penerapan anggaran berbasis kinerja

X_5 : penerapan SAP berbasisakrual

e : variabel pengganggu/eror

4. Pengujian Hipotesis

a. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar presentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Semakin besar koefisien determinannya, maka semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2011;97).

b. Uji F

Uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011;98). Tingkat kepercayaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 95% atau signifikansi 5% ($\alpha=0,05$).

c. Uji Statistik t

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel

dependen (Ghozali, 2011:98). Tingkat kepercayaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 95% atau signifikansi 5% ($\alpha=0,05$). Uji statistik t dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel, jika t hitungbesart tabel maka Ho tidak terdukung dan Ha terdukung demikian juga sebaliknya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data Penelitian

Kuesionerdisebarkan di 13 SKPD sehingga kuesioner yang tersebar sebanyak 90 kuesioner. Hingga batas akhir pengumpulan data kuesioner yang diterima kembali sebanyak 77 kuesioner dari 90 kuesioner yang disebarakan

Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah pegawai bagian keuangan pada setiap SKPD pemerintah kota Yogyakarta. Demografi responden yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, dan lama bekerja.

Uji Validitas dan Reliabilitas

Berdasarkan hasil olah data diketahui bahwa semua butir pernyataan dinyatakan valid, karena r hitung > r tabel dan dinyatakan reliabel karena tiap butir pernyataan pada setiap variabel memiliki nilai *Cronbach's alpha* di atas 0,70.

Statistik Deskriptif

Statistik dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel-variabel penelitian antara mean, nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi. Hasil stastistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 1.

Uji Asumsi Klasik

Hasil uji normalitas menyatakan nilai *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 1,007 dengan signifikan 0,263>0,05 maka dapat dinyatakan data yang digunakan dalam penelitian ini telah berdistribusi normal. Hasil uji multikolonieritas diketahui bahwa setiap variabel memiliki nilai *Tolerance* d" 0,10 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) e" 10. Sehingga tidak terdapat Multikolinieritas

Tabel 1
Hasil Pengujian Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PenyajianLaporanKeuang an Daerah	77	33.00	55.00	45.6623	3.88184
AksesibilitasLaporanKeua ngan Daerah	77	6.00	15.00	11.4416	1.94999
Pengendalian Internal	77	27.00	45.00	36.3117	3.09609
PenerapanAnggaranBerba sisKinerja	77	30.00	50.00	40.4026	3.34530
Penerapan SAP BebasisAkrua	77	69.00	115.00	92.9870	7.79422
TransparansiPengelolaan Keuangan Daerah	77	13.00	25.00	19.4675	2.18599
Valid N (listwise)	77				

Sumber: data primer, diolah, 2017

terhadap variabel penelitian. Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan nilai signifikansi semua variabel independen > 0,05, sehingga model regresi ini layak digunakan, pada model regresi tidak ada masalah heteroskedastisitas.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar persentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Semakin besar koefisien determinannya, maka semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2011;97). Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2) dapat dilihat pada tabel 2.

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel 2 diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,503 artinya besarnya pengaruh dari penyajian laporan Keuangan Daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah, pengendalian internal, penerapan anggaran berbasis kinerja, dan penerapan SAP berbasis akrual sebesar 50% sisanya sebesar 50% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.

Uji Statistik F

Uji statistik F dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel, apabila nilai F hitung \geq F tabel maka model yang digunakan layak demikian juga

Tabel 2
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.732 ^a	.536	.503	1.54040

a. Predictors: (Constant), penyajian laporan Keuangan Daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah, pengendalian internal, penerapan anggaran berbasis kinerja, penerapan SAP berbasis akrual

Sumber: data primer, diolah, 2017

Tabel 3
Hasil Uji Statistik F

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	194.699	5	38.940	16.411	.000 ^a
	Residual	168.470	71	2.373		
	Total	363.169	76			

a. Predictors: (Constant), penyajian laporan Keuangan Daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah, pengendalian internal, penerapan anggaran berbasis kinerja, penerapan SAP berbasis akrual

b. Dependent Variable: transparansi pengelolaan keuangan daerah

Sumber: data primer, diolah, 2017

sebaliknya. Hasil Uji Statistik F dapat dilihat pada tabel 3.

Pada tabel 3 diperoleh nilai F hitung sebesar 16,411 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Hasil pengolahan menunjukkan bahwa F hitung sebesar $16,411 > F$ tabel sebesar 2,34 dengan signifikan $0,00 < 0,05$ hal ini berarti bahwa penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah, pengendalian internal, penerapan anggaran berbasis kinerja, penerapan SAP berbasis akrual berpengaruh secara simultan terhadap variabel transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Uji Statistik t

Uji statistik t dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel, jika t hitung $> t$ tabel maka H_0 tidak terdukung dan H_a terdukung demikian juga sebaliknya. Hasil Uji statistik t dapat dilihat pada tabel 4.

Berdasarkan tabel 4 diperoleh persamaan regresinya adalah:

$$Y = 0,875 + -0,084X_1 + 0,313X_2 + -0,020X_3 + 0,116X_4 + 0,160X_5$$

Variabel penyajian laporan keuangan daerah memiliki tingkat signifikan sebesar 0,209 dan t hitung sebesar -1,267. Berarti tingkat signifikan lebih besar dari 0,05 ($0,209 > 0,05$) dan t hitung $< t$ tabel ($-1,267 < 1,6660$). Hal ini berarti H_1 tidak berpengaruh signifikan, H_0 terdukung dan H_1 tidak terdukung, sehingga dapat disimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah. Hal ini berarti tidak mendukung perumusan hipotesis 1 bahwa variabel penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Tabel 4
Hasil Uji Statistik t

		Coefficients ^a				
		Unstandardized	Standardized			
		Coefficients	Coefficients			
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	.875	2.471		.354	.724
	Penyajian laporan keuangan daerah	-.084	.066	-.149	-1.267	.209
	Aksesibilitas laporan keuangan daerah	.313	.101	.279	3.088	.003
	Pengendalian internal	-.020	.085	-.029	-.238	.812
	Penerapan anggaran berbasis kinerja	.116	.085	.177	1.362	.178
	Penerapan SAP berbasis akrual	.160	.034	.571	4.727	.000

a. Dependent Variable: transparansi pengelolaan keuangan daerah

Sumber: data primer, diolah, 2017

Variabel aksesibilitas laporan keuangan daerah memiliki tingkat signifikan sebesar 0,003 dan t hitung sebesar 3,088. Berarti tingkat signifikan lebih kecil dari 0,05 ($0,003 < 0,05$) dan t hitung lebih besar dari t tabel ($3,088 > 1,6660$). Hal ini membuktikan bahwa H_0 tidak terdukung dan H_2 terdukung, sehingga dapat disimpulkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah. Hal ini berarti mendukung perumusan hipotesis 2 bahwa variabel aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Variabel pengendalian internal memiliki tingkat signifikan sebesar 0,812 dan t hitung sebesar -0,238. Berarti tingkat signifikan lebih besar dari 0,05 ($0,812 < 0,05$) dan t hitung lebih kecil dari t tabel ($-0,238 >$). Hal itu berarti H_3 tidak berpengaruh signifikan, H_0 terdukung dan H_3 tidak terdukung, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah. Hal ini berarti tidak mendukung perumusan hipotesis 3 bahwa variabel pengendalian internal berpengaruh positif terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Variabel penerapan anggaran berbasis kinerja memiliki tingkat signifikan sebesar 0,178 dan t hitung sebesar 1,362. Berarti tingkat signifikan lebih besar dari 0,05 ($0,178 > 0,05$) dan t hitung lebih kecil dari t tabel ($1,362 < 1,6660$). Hal itu berarti H_4 tidak berpengaruh signifikan, H_0 terdukung dan H_4 tidak terdukung, sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah. Hal ini berarti tidak mendukung perumusan hipotesis 4

bahwa variabel penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Variabel penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual memiliki tingkat signifikan sebesar 0,000 dan t hitung sebesar 4,727. Berarti tingkat signifikan lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) dan t hitung lebih besar dari t tabel ($4,727 > 1,6660$). Hal ini membuktikan bahwa H_0 tidak terdukung dan H_5 terdukung, sehingga dapat disimpulkan bahwa standar akuntansi pemerintah berbasis akrual berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah. Hal ini berarti mendukung perumusan hipotesis 5 bahwa variabel penerapan SAP berbasis akrual berpengaruh positif terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah, pengendalian internal, penerapan anggaran berbasis kinerja, dan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah.
2. Penyajian laporan keuangan daerah tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah.
3. Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah.
4. Pengendalian internal tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah.

5. Penerapan anggaran berbasis kinerja tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah.
6. Penerapan SAP berbasis akrual berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Saran

1. Pemerintah daerah diharapkan melakukan reformasi penyajian laporan keuangan dalam aspek karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu disajikan secara lengkap dan mencakup semua informasi yang dibutuhkan pengguna dan informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan disajikan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.
2. Pemerintah Daerah diharapkan dapat mempublikasikan laporan keuangan dan memberikan kemudahan akses bagi pihak yang membutuhkan melalui media seperti surat kabar, majalah, dan internet.
3. Pemerintah daerah perlu melakukan perbaikan dan peningkatan sistem pengendalian internal dengan cara menerapkan menerapkan pengendalian intern dan manajemen terhadap resiko secara efektif.
4. Pemerintah daerah harus memahami dan melaksanakan dengan baik prosedur yang menjadi unsur anggaran berbasis kinerja, melakukan kontrol sebelum dan sesudah anggaran digunakan, melakukan penerapan efisiensi (*saving*) dalam proses penganggaran.
5. Pemerintah daerah perlu menerapkan SAP berbasis akrual agar menjadi pedoman dalam menyusun informasi pertanggungjawaban anggaran pemerintah melalui laporan keuangan yang disajikan.
6. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah sampel penelitian serta memperluas wilayah sampel penelitian sehingga dapat diperoleh hasil penelitian dengan tingkat generalisasi saja tetapi juga yang lebih tinggi. Selain itu peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah sampel dari pihak pengguna eksternal laporan keuangan daerah, tidak hanya pihak pengguna internal atau pihak penyaji laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhi, Daniel Kartika, ed (2013), *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Tual)*, Jurnal STIE Semarang, Vol. 5, No. 3, ISSN : 2252-7826.
- Aliyah, Siti, ed (2012), *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Jepara*. Jurnal Akuntansi dan Auditing Volume 8, No. 2, Mei, pp: 97-189.
- Armando, Gerry (2013), *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris pada SKPD di Kota Bukittinggi)*, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Republik Indonesia, 2005,

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Avionita, Venni (2011), *Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Program Peningkatan Disiplin Aparatur Instansi Pemerintah Daerah*, Universitas Widyatama, Bandung, (Jurnal tidak dipublikasikan)
- Bastian, Indra (2006), *Akuntansi Sektor Publik (Suatu Pengantar)*. Erlangga, Jakarta.
- Ghozali, Imam (2011), *Aplikasi Analisa Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Halim, Abdul, ed (2014), *Akuntansi Sektor Publi*, Salemba Empat, Jakarta.
- Hastuti, Arum Indri (2015), *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Daerah Di Kabupaten Boyolali*. Jurnal Publikasi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Hehanusa, Salomi J (2015), *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon*, Jurnal Publikasi ISSN 2303-9791, Vol. 2, No. 1, Mei.
- Mahmudi (2010), *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mardiasmo (2002), *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi Offset, Yogyakarta.
- Mardiasmo (2002), *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Offset, Yogyakarta.
- Republik Indonesia (2004), Undang-undang Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia (2004), Undang-undang Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia (2005), Peraturan Pemerintah Nomor 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia (2008), Peraturan Pemerintah Nomor 60 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Republik Indonesia (2010), Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Sande, Peggy (2013), *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat)*. Jurnal publikasi Fakultas Ekonomi Uneversitas Negeri Padang.
- Sari, Diana (2012), *Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Jurnal Publikasi ISSN-2252-3936.
- Satyaningsi, Komang Ayu, ed (2014), *Pengaruh Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja Dan Ketidakpastian Lingkungan Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung)*, e-Journal Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014).
- Suwati, Monika Khairunnisa, ed (2015), *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Dinas Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu)*, Jurnal Akuntansi dan Bisnis Vol. 1, No. 2, ISSN 2460-030X.

Tarigan, Erwinton Putra Atonius (2013), *Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik Vol 17 No 1 – Mei, ISSN 0852-9213.

Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kota Tegal, Jurnal Publikasi Vol. 4 No. 1 ISSN: 2303-2235, E-ISSN: 2476-8820.

<http://jogjakota.go.id>. Diakses pada tanggal 6 Februari 2017

Wibawa, Dimas Satria, ed (2016), *Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dan Efektivitas Fungsi Pengawasan Terhadap Kinerja*